

DOKUMEN

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2022



KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,**

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen evaluasi perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Maksud penyusunan dokumen evaluasi RKPD 2022 ini adalah untuk mengetahui ketercapaian indikator Kota dan Perangkat Daerah.

Tim penyusun dokumen evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen evaluasi hasil RKPD ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen evaluasi hasil RKPD ini tidak dapat terwujud.

Dokumen ini merupakan *living document* yang perlu disempurnakan, oleh karena itu mohon kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan dokumen RKPD di masa yang akan datang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Cimahi, ... 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI,

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197304131998031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penyajian Laporan.....	6
BAB II METODE EVALUASI.....	7
2.1 Jenis Evaluasi.....	7
2.2 Metode Evaluasi.....	10
2.3 Pengumpulan Data.....	11
2.4 Ruang Lingkup Evaluasi.....	12
BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI.....	13
3.1 Visi dan Misi Kota Cimahi.....	13
3.2 Tujuan, Sasaran Kota dan Indikator Sasaran Kota.....	23
3.3 Arah Kebijakan.....	28
3.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2022.....	37
3.5 Program Pembangunan Tahun 2022.....	41
3.6.1 Kebijakan Pembiayaan daerah.....	47
3.6.2 Ringkasan Struktur Anggaran RKPD Tahun 2022.....	48
3.6.3 Anggaran Program Pembangunan Kota Cimahi.....	50
BAB IV CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.....	112
4.1 Evaluasi terhadap sistematika RKPD Kota Cimahi Tahun 2022.....	112
4.2 Capaian Indikator Kinerja RKPD Kota Cimahi Tahun 2022.....	112
4.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	112

4.2.2	Capaian Kinerja Bidang Urusan	114
4.2.3	Capaian Indikator Kinerja Program (IKP)	119
4.2.4	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	138
4.3	Penjabaran RPJMD ke RKPD dan APBD	138
4.3.1	Analisis Kinerja Keuangan	138
4.3.2	Pejabaran RPJMD ke RKPD dan APBD Tahun 2022	143
BAB V FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA		
		145
5.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.....	145
BAB VI PENUTUP		162
6.1	Kesimpulan.....	162
6.2	Rekomendasi	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2018-2022	28
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	9
Tabel 3. 1 Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	25
Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi	28
Tabel 3. 3 Program Pembangunan Per Bidang Urusan	41
Tabel 3. 4 Perkiraan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kota Cimahi TA. 2022	48
Tabel 3. 5 Struktur Anggaran RKPD Tahun 2022	49
Tabel 3. 6 Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi Tahun 2022	50
Tabel 3. 7 Pagu Indikatif Perangkat daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2022 ..	51
Tabel 3. 8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 ..	52
Tabel 3. 10 Laporan Realisasi Keuangan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022	139
Tabel 3. 11 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2022	141
Tabel 3. 12 Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tahun 2022.....	143
Tabel 4. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi Tahun 2022.....	113
Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2022.....	115
Tabel 4. 4 Realisasi Indikator Program Kota Cimahi Tahun 2022	119

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Siswanto (2014), pembangunan secara umum melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Ketiganya memiliki peran yang penting untuk meningkatkan mutu kinerja pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Proses pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan pemerintahan daerah, badan hukum swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan diperlukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki rencana pembangunan pada masa yang akan datang. Selain itu, kegiatan evaluasi pembangunan juga perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan.

Kegiatan evaluasi pembangunan telah diatur di dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan tata cara tentang kegiatan ini dijelaskan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a) Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan;
- c) Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pada kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan daerah (RKPD).

Pentingnya pengendalian dan evaluasi di dalam sebuah proses pembangunan daerah yang diamanatkan oleh UU No 25 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjadi dasar setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk menyusun laporan pengendalian dan evaluasi. Oleh sebab itu, Pemerintahan Kota Cimahi melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) menyusun laporan pengendalian dan evaluasi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi peraturan yang ada juga sebagai bahan untuk membuat perencanaan pada masa yang akan datang. Laporan pengendalian dan evaluasi ini merupakan sebuah laporan evaluasi tahunan terhadap RKPD tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum dalam laporan monitoring dan evaluasi RKPD tahun 2022 :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana.
 - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
 - Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
 - Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 546 Tahun 2020).
 - Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran capaian tujuan pembangunan dan menganalisis permasalahan serta faktor keberhasilan yang terjadi sehingga hasilnya dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan pembangunan tahun selanjutnya.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tahunan memiliki tujuan untuk mewujudkan:

- 1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- 2) Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- 3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota Cimahi Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang gambaran umum penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II METODE EVALUASI

Memuat penjelasan metode yang digunakan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI

Memuat penjelasan terkait perencanaan pembangunan kota cimahi, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Kota, Prioritas Pembangunan dan Program Kegiatan Pembangunan.

BAB IV CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Memuat penjelasan tentang capaian kinerja pembangunan daerah mulai dari indikator sasaran kota sampai dengan ketercapaian indikator kegiatan.

BAB V FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Memuat penjelasan tentang faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja dari setiap tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi

BAB II METODE EVALUASI

2.1 Jenis Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, jenis evaluasi terdiri dari:

- a. **Evaluasi Ex-ante**, merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap perencanaan.
- b. **Evaluasi Pengukuran Kinerja** adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan, antara lain menggunakan aplikasi e-monev yang memantau pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system.
- c. **Evaluasi Proses Pelaksanaan Rencana Pembangunan**, pada umumnya dilaksanakan selama fase implementasi untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan; mengidentifikasi fungsi-fungsi mana yang telah berjalan dengan baik dan mana yang tidak; menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana; dan melihat permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan. Evaluasi proses pelaksanaan akan selesai dilakukan di akhir pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dengan melihat pelaksanaan dari awal hingga akhir.
- d. **Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar**, merupakan penilaian sedara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab-akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Evaluasi kebijakan strategis/program besar dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya/kredibel, bermanfaat dan mampu untuk memberikan pembelajaran ke dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran.

Adapun jenis evaluasi yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi, Bappeda Kota Cimahi sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 adalah gabungan evaluasi *ex-ante*, pengukuran kinerja, dan evaluasi proses pelaksanaan.

Evaluasi *ex-ante* digunakan untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang dicapai, juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran. Evaluasi *ex-ante* juga digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis. Melalui evaluasi *ex-ante* diharapkan dokumen perencanaan tersusun secara terstruktur, koheren dan sistematis.

Evaluasi pengukuran kinerja digunakan mengukur kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada masing-masing Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian dan targetnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu:

Tabel 2. 1 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pada Permendari Nomor 86 Tahun 2017 tersebut disebutkan juga bahwa:

- Predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah), maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja (gap) sebesar $49\% \geq 35\%$.
- Predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian $78\% \leq 90\%$ (tinggi), maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja (gap) sebesar $24\% \leq 10\%$.
- Predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah), maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut sebesar $51\% \leq 65\%$.
- Predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian $78\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut sebesar $78\% \leq 90\%$.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data output dalam waktu reguler (biasanya setiap triwulan) untuk mengawasi dan mendeskripsikan bagaimana aktivitas dari pelaksanaan kebijakan/program. Hasil evaluasi proses digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan sehingga lebih efektif. Data hasil evaluasi proses pelaksanaan digunakan pada saat melakukan perubahan rencana kerja tahunan.

2.2 Metode Evaluasi

Berdasarkan jenis evaluasi yang dilaksanakan, metode evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Metode penilaian cepat (*rapid assessment*), Wawancara, dan *Focus Group Discussion (FGD)***, merupakan metode yang paling tepat digunakan pada saat melakukan evaluasi ex-ante. Metode ini digunakan untuk melihat struktur dan sistematika dokumen perencanaan. Mekanisme yang biasa digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen RKPD Kota Cimahi adalah dengan melakukan penilaian cepat dan wawancara. Penilaian cepat dilakukan melalui penelaahan dokumen (document review).
- b. **Metode *gap analysis***, merupakan metode yang digunakan pada saat melakukan evaluasi pengukuran kinerja. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, dan

dapat bernilai negatif jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja. Metode ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
- 2) Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
- 3) Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

c. Metode kualitatif dan kuantitatif atau kombinasi keduanya, biasa digunakan pada evaluasi proses pelaksanaan. Metode kualitatif dilakukan apabila evaluator hanya memiliki sedikit informasi tentang aktivitas kebijakan/program/kegiatan, kebijakan/program/kegiatan menggunakan metode yang tidak biasa, dan dasar pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan meragukan. Metode kualitatif mampu memberikan informasi yang kaya, detil mendalam dan memberikan informasi hubungan antar ide. Namun, apabila evaluator sudah memahami kebijakan/program/kegiatan dengan baik dan ingin mendapatkan data mengenai frekuensi dan intensitas pelayanan yang konsisten dan dapat dipercaya, maka dapat menggunakan metode kuantitatif.

2.3 Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data pada evaluasi *ex-ante* dilakukan melalui penelaahan konsistensi antar dokumen perencanaan, penelaahan penyusunan kebijakan/program/kegiatan, dan penyampaian rekomendasi perbaikan. Mekanisme pengumpulan data pada evaluasi pengukuran kinerja biasanya menggunakan telaahan dokumen (document review), pemanfaatan data survei yang dilakukan sendiri maupun hasil survei yang

dilakukan oleh lembaga lain seperti BPS, World Bank, UNDP, dan sebagainya, pemanfaatan hasil penelitian dan metode pengumpulan data lainnya yang diperlukan. Selanjutnya adalah pengumpulan data pada evaluasi proses pelaksanaan dilakukan melalui pengumpulan data output dalam waktu reguler (biasanya setiap bulan, triwulan, dan semester) untuk mengawasi dan mendeskripsikan bagaimana aktivitas dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

2.4 Ruang Lingkup Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 dilakukan terhadap RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, RKPD Kota Cimahi Tahun 2022, RKPD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2019, KUA PPAS dan KUPA PPAS Tahun 2019, Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019, APBD Kota Cimahi Tahun 2019, APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2019. Ruang lingkup evaluasi adalah pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Adapun jenis evaluasi yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi, Bappeda Kota Cimahi yaitu gabungan evaluasi ex-ante, pengukuran kinerja, dan evaluasi proses pelaksanaan.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI

3.1 Visi dan Misi Kota Cimahi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005-2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah:

CIMAHI KOTA "CERDAS"

Yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- b. Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- c. Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- d. Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun;
- e. Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang;

- f. Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi **CIMAHI KOTA "CERDAS"** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2017-2022 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.

Pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

MEWUJUDKAN CIMAHI BARU
MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni ; Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut: **Pertama, Maju.** Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor

pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarkan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketentuan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun

kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hat ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional menjadi dalam sebagai pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintahan yang Bersih (clean goverment), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada consensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kota Cimahi harus maju, bertambah baik di semua aspek kehidupan. Outputnya adalah kesejahteraan sebagai wujud rasa masyarakat Cimahi akan menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam budaya gotong royong, sehingga dapat menikmati semua hasil pembangunan Kota Cimahi tanpa terkecuali untuk menikmati pendidikan yang terjamin, kesehatan keluarga dan tingkungan tercukupi, dan keseharian hidup masyarakat yang tercukupi kebutuhannya dengan tetap mengacu pada dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Bahwa pemimpin dan masyarakat Kota Cimahi harus sinergi dalam memaknai budaya sebagai bentuk kreativitas yang sebagai suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/ adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kemampuan untuk menentukan pertalian baru,

melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran dan kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Diharapkan melalui pengembangan budaya, masyarakat Kota Cimahi bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif yang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinal, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, budaya yang melahirkan ide kreatif dan inovatif itu sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena kreatif dan inovatif itu sangat menentukan kualitas hidup kita dalam bidang pemerintahan dan kerakyatan yang dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif karena akan menentukan keberlangsungan kehidupan Kota Cimahi.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah

ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, maka rumusan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan merupakan amanah seluruh komponen Kota Cimahi untuk dilaksanakan secara baik dan benar dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Bila sudah dilaksanakan percepatan hasil pembangunan akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang pada akhirnya ditujukan pada pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia dan tentunya dengan harapan ada dalam lindungan dan karunia Allah SWT.

Menciptakan kenyamanan yang berkorelasi dengan kesejahteraan sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Cimahi berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan masyarakat, pengelolaan aspek lingkungan masyarakat, dan pembangunan manusia seutuhnya, dalam arti materil dan spiritual. Aman dalam makna kesejahteraan dapat terwujud dengan baik apabila tercipta sinergi dan keberlanjutan antara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kota Cimahi sampai dengan tahun 2022.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi

pembangunan jangka menengah Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi Pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintahan yang bersih (clean goverment), anti korupsi dan

bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha Kecil Menengah.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan guidelines kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga

keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (capacity building) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

3.2 Tujuan, Sasaran Kota dan Indikator Sasaran Kota

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022 dirumuskan untuk memberikan arahan terhadap program pembangunan daerah sehingga dapat mendukung pengejawantahan visi dan misi RPJMD 2017-2022 khususnya pada tahun terakhir. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022 juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan.

Mengingat penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 dilakukan pada Tahun 2021, pada saat dimana beberapa kondisi khusus terjadi, baik

itu yang terjadi pada skala lokal, regional, nasional ataupun dunia global, yaitu antara lain :

1. Pandemi Covid-19 yang masih menunjukkan angka kasus tinggi;
2. Kebijakan pembatasan penganggaran penghasilan ASN pada tahun 2021;
3. Penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum dialokasikan kedalam struktur anggaran Kota Cimahi; dan
4. Adanya alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 yang diasumsikan tercapai ternyata menjadi lebih besar setelah melalui audit BPK.

Maka dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022. Berikut ini tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022.

Tabel 3. 1 Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Perubahan 2022
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul			
Tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,41
Sasaran: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	74,9
Sasaran: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	83,12
Sasaran: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persen	1
Misi 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik			
Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60,73 (B)
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Predikat	Tinggi
Sasaran: Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Opini	WTP
Sasaran: Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62
Sasaran: Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,20
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19
Misi 3: Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan			
Tujuan: Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	PDRB perkapita	Juta Rupiah	37,77

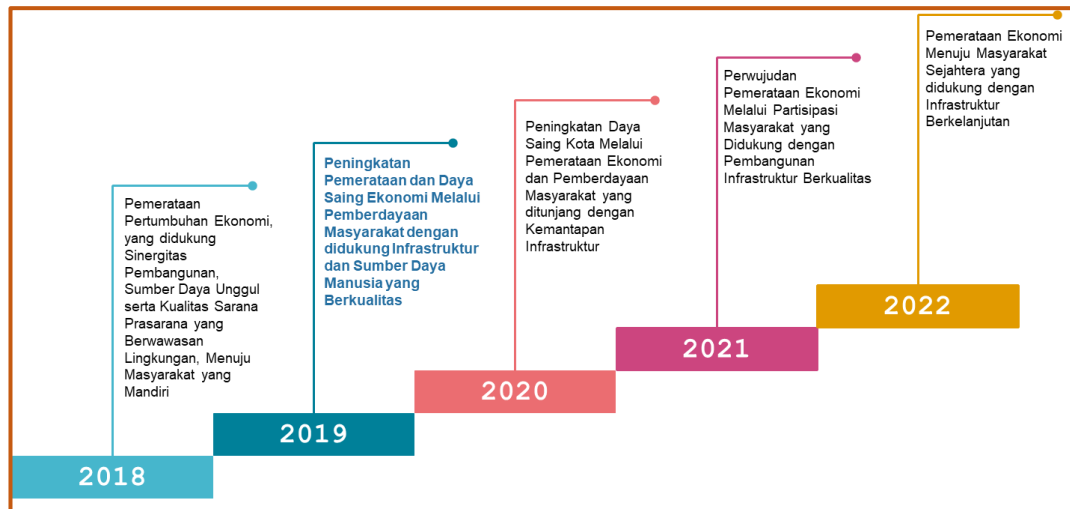
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Perubahan 2022
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,11
Sasaran: Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,38
Sasaran: Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	5,02
Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,37
MISI 4: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
Tujuan: Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS)	Predikat	C
Sasaran: Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS)	Predikat	C
Tujuan: Meningkatkan kualitas permukiman	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	0,18
Sasaran: Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh (%)	Persen	0,18
Tujuan: Meningkatkan ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang
Sasaran: Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang
Tujuan: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	36,07
Sasaran: Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	36,07
MISI 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan			
Tujuan: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	75,00
Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	82,00

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Perubahan 2022
Sasaran: Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Indeks	75,00
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,60

Sumber : RKPD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2022

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2022 adalah Pemerataan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera yang didukung dengan Infrastruktur Berkelanjutan. Berikut dapat dilihat tahapan kebijakan Kota Cimahi dari tahun 2018-2022.



Gambar 3. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022 ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan 2021 yang merupakan tahun kelima dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata	Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat
			Meningkatkan Mutu Pendidikan
		Peningkatan pengelolaan	Mengembangkan upaya-upaya

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid- 19.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah	peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan
			Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan
			Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan
			Meningkatkan Pelayanan Rujukan
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Penguatan dan pepaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana
Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil
			Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah
	Meningkatnya profesionalitas aparatur		Meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima
			Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan pelayanan publik kecamatan
			Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pelayanan publik
			Meningkatkan kualitas dan integrasi Teknologi,

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Informatika dan Komunikasi (TIK) daerah
			Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat
			Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan iklim dan realisasi investasi	a. Meningkatkan iklim dan promosi penanaman modal b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal c. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
		Peningkatan daya saing industri kecil menengah	Meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengendalian serta pengawasan industri kecil menengah
		Pengembangan sektor perdagangan,	a. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas distribusi

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			b. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk buatan dalam negeri
		Peningkatan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Mengembangkan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Optimalisasi pengembangan UMKM	a. Meningkatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM b. Meningkatkan skala usaha UMKM
		Menjaga ketersediaan dan konsumsi pangan serta meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat	a. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan
		Peningkatan kapasitas dan kualitas koperasi	a. Meningkatkan sistem dan manajerial koperasi b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola koperasi
		Peningkatan kesejahteraan petani/peternak	Meningkatkan penyuluhan pertanian

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan produk dan produktivitas pertanian/peternakan	a. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian b. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner c. Meningkatkan budidaya perikanan
		Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Produk turunan Pertanian	Meningkatkan pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan dan menciptakan kesempatan kerja	a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja b. Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan tenaga kerja c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja d. Meningkatkan informasi pasar kerja
		Peningkatan kesejahteraan buruh	a. Meningkatkan Perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja b. Meningkatkan upaya pencegahan dan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penyelesaian perselisihan tenaga kerja
Pemulihan sosial akibat pandemi Covid-19	Menurunnya kemiskinan	Peningkatan perlindungan dan pelayanan sosial	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terutama penerapan Jaring Pengaman Sosial (JPS), pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial
			dan dan Meningkatkan inovasi penanggulangan kemiskinan pada kelembagaan masyarakat melalui teknologi tepat guna dan media lainnya.
		Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur Akses Pelayanan Dasar
		Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan penanganan kerawanan pangan
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi	Meningkatkan kinerja pelayanan, sarana dan prasarana perhubungan
			Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			lintas angkutan jalan
			Meningkatkan pelayanan angkutan umum
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Mengurangi dan menangani timbunan sampah
	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik		Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah domestik
	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman		Mengurangi titik dan luas genangan
	Meningkatnya pelayanan air bersih		Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Pengentasan permukiman kumuh perkotaan	Mengembangkan permukiman layak huni
Meningkatnya ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
			Meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan	Meningkatkan kualitas udara dan air permukaan
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
			Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan Meningkatkan inovasi Masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna dan media lainnya.
			Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda
			Melestarikan, memajukan dan mempromosikan kebudayaan
			Meningkatkan sumber daya keolahragaan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender
			Meningkatkan perlindungan dan hak hak anak
			Meningkatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya

Sumber : RKPD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2022

3.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2022

Arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2022 sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah:

“Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera yang didukung dengan Infrastruktur Berkelanjutan”.

Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan dokumen RKPD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa untuk Bab IV pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari RPJMD., serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kota Cimahi pada Tahun 2022, fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada:

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;

3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Jawa Barat Tahun 2022; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan pemenuhan Janji Wali Kota yang tertuang pada RPJMD Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan fokus pada pemulihan dan pembangunan kembali kota dengan menuntaskan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota serta memprioritaskan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Adapun permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Cimahi yang terangkum antara lain sebagai berikut :

Terdapat 21 permasalahan pembangunan di Kota Cimahi :

1. Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal;
2. Masih terjadi ketimpangan pendapatan;
3. Kurangnya penyerapan tenaga kerja;
4. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
5. Menurunnya Kualitas Jalan Dalam Kondisi Baik;
6. Masih rendahnya tingkat pelayanan jalan dan transportasi di Kota Cimahi;
7. Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
8. Belum optimalnya akses terhadap air bersih;
9. Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik;
10. Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir di Kota Cimahi;
11. Belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
12. Tingginya potensi bencana;
13. Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup;
14. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
15. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan;
16. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat;
17. Belum optimalnya pengendalian kependudukan;
18. Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK);
19. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan sarana prasarana olahraga;

21. Belum optimalnya peran sektor industri, perdagangan dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian kota; dan
22. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal.
23. 1 + Penanganan dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi dan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan Kota Cimahi antara lain :

1. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan;
2. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi;
3. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Penanggulangan Pengangguran;
6. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan;
7. Optimalisasi Peran Sektor Industri Kecil Menengah, Perdagangan Dan Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah;
8. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
9. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi;
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
13. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;
14. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk; dan
15. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun, tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2022 adalah :

“Mempercepat Pemulihan Sosial dan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas”

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan tema pembangunan Kota Cimahi maka disusun prioritas pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022 yang ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19;
2. Pemulihan sosial akibat pandemi Covid-19;
3. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19;
4. Meningkatnya ketahanan bencana;
5. Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi;
6. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
10. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Selain itu, prioritas pembangunan ini harus diselaraskan dengan Prioritas Wali Kota yang tertuang dalam janji politik dan tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022, yaitu : (1) 1.000 Lapangan Kerja; (2) Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan; (3) Gratis Raskin; (4) Santunan Kematian Masyarakat Ber-KTP; (5) Gratis Izin Usaha Khusus UMKM, Kemudahan Birokrasi; (6) Tambahan Insentif RT/RW; (7) Alokasi Anggaran Rp. 100.000.000,- di setiap RW Per-Tahun; (8) Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance di Setiap Kelurahan; (9) Tambahan Penghasilan Guru; (10) Tambahan Insentif Guru Ngaji; (11) Tambahan Fasilitas dan Insentif Guru PAUD; (12) Bebas SPP; (13) Keringanan DSP SMU/SMK; (14) Kesejahteraan Buruh; (15) Kestabilan Keberlangsungan Industri; (16) Kemudahan Birokrasi; (17) Pembangunan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri; (18) Pengembangan Pasar Tradisional; (19) Optimalisasi Sarana Olahraga; (20)

Pembangunan "Imah Seni Budaya" Cimahi; dan (21) Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka Publik.

3.5 Program Pembangunan Tahun 2022

Program dan kegiatan pada tahun 2022 terdapat 119 program, 227 kegiatan dan 650 sub kegiatan. Berikut disajikan data program pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022 menurut bidang urusan :

Tabel 3. 3 Program Pembangunan Per Bidang Urusan

BIDANG URUSAN	PROGRAM
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN	PROGRAM
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BIDANG URUSAN	PROGRAM
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BIDANG URUSAN	PROGRAM
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

BIDANG URUSAN	PROGRAM
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.02 SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01 PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN	PROGRAM
5.02 KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
7.01 KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

BIDANG URUSAN	PROGRAM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TOTAL ANGGARAN	

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2022

3.6 Penganggaran Program Pembangunan Tahun 2022

3.6.1 Kebijakan Pembiayaan daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; pinjaman daerah; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam keadaan keterbatasan anggaran APBD untuk menyelesaikan pekerjaan yang pelaksanaannya melebihi tahun anggaran dan memerlukan pembiayaan yang besar perlu juga dikaji tentang skema mutliyears contract.

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 298.459.987.420,64 atau 148,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 201.490.007.833,00. Penerimaan pembiayaan Rp. 308.665.364.620,64 atau 144,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 213.919.816.170,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 10.205.377.200,00 atau 82.10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 12.429.808.337,-. Perkiraan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Perkiraan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kota Cimahi TA. 2022

Uraian	Sebelum Perubahan (APBD 2022)	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang) (dari Murni)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.919.816.170	308.665.364.621	94.745.548.451
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	213.919.816.170	308.665.364.621	94.745.548.451
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	213.919.816.170	308.665.364.621	94.745.548.451
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.429.808.337	12.429.808.337	0
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.808.337	2.429.808.337	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.429.808.337	12.429.808.337	-
Pembiayaan Netto	201.490.007.833	296.235.556.284	94.745.548.451
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-805.620.000	-805.620.000
TOTAL APBD	1.493.254.708.490	1.612.917.093.433	119.662.384.943

Sumber : RKPD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2022

3.6.2 Ringkasan Struktur Anggaran RKPD Tahun 2022

Perkiraan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Struktur Anggaran RKPD Tahun 2022

Uraian	Sebelum Perubahan (APBD 2022)	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355.046.836.583	375.060.580.277	20.013.743.694
Pajak Daerah	158.885.001.230	162.897.542.251	4.012.541.021
Retribusi Daerah	12.780.921.500	10.349.195.000	-2.431.726.500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000	11.022.613.597	1.631.413.597
Lain-lain PAD yang Sah	173.989.713.853	190.791.229.429	16.801.515.576
PENDAPATAN TRANSFER	924.288.055.737	928.385.528.535	4.097.472.798
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000	780.757.532.293	-12.769.993.707
Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.760.529.737	147.627.996.242	16.867.466.505
JUMLAH PENDAPATAN	1.279.334.892.320	1.303.446.108.812	24.111.216.492
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.377.256.987.159	1.484.563.462.851	107.306.475.692
Belanja Pegawai	727.600.156.083	762.318.807.697	34.718.651.614
Belanja Barang dan Jasa	549.567.914.626	615.173.361.311	65.605.446.685
Belanja Bunga	500.000.000	500.000.000	-
Belanja Subsidi	200.000.000	0	-200.000.000
Belanja Hibah	96.603.586.450	102.172.624.888	5.569.038.438
Belanja Bantuan Sosial	2.785.330.000	4.398.668.955	1.613.338.955
BELANJA MODAL	78.567.912.994	91.403.089.245	12.835.176.251
Belanja Modal Tanah	1.691.568.810	7.198.569.007	5.507.000.197
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.629.628.558	17.990.193.593	2.360.565.035
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.765.239.946	49.240.726.096	3.475.486.150
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.747.680	16.798.135.549	1.504.387.869
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.728.000	175.465.000	-12.263.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	24.520.733.000	-479.267.000
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	24.520.733.000	-479.267.000
JUMLAH BELANJA	1.480.824.900.153	1.600.487.285.096	119.662.384.943
Total Surplus/(Defisit)	-201.490.007.833	-297.041.176.284	-95.551.168.451
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.919.816.170	308.665.364.621	94.745.548.451
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	213.919.816.170	308.665.364.621	94.745.548.451
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	213.919.816.170	308.665.364.621	94.745.548.451
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.429.808.337	12.429.808.337	0
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.808.337	2.429.808.337	-

Uraian	Sebelum Perubahan (APBD 2022)	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.429.808.337	12.429.808.337	-
Pembiayaan Netto	201.490.007.833	296.235.556.284	94.745.548.451
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-805.620.000	-805.620.000
TOTAL APBD	1.493.254.708.490	1.612.917.093.433	119.662.384.943

Sumber : RKPD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2022

3.6.3 Anggaran Program Pembangunan Kota Cimahi

Pada dasarnya Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 ditujukan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 dan target yang ada di RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang dijabarkan pada melalui berbagai indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,58
2	Indeks Pendidikan	Indeks	74,9
3	Indeks Kesehatan	Indeks	83,12
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persen	1
5	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60,73 (B)
6	Nilai SAKIP	Predikat	BB
7	Nilai LPPD	Predikat	Sangat Tinggi
8	Opini BPK	Opini	WTP
9	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73
10	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,2
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19
12	PDRB perkapita	Juta Rupiah	37,77
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,11
14	Indeks Gini	Indeks	0,38
15	Angka Kemiskinan	Persen	5,02
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,37
17	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	Predikat	C
18	Rasio luas kawasan kumuh (%)	Persen	0,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	2022
19	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	35,48
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93
22	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	99,4
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	80,48

Sumber : Bappelitbangda Tahun 2022 (data diolah)

Pagu indikatif Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Pagu Indikatif Perangkat daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu indikatif	
		Sebelum	Sesudah
1	Dinas Pendidikan	398.257.489.147	416.400.541.120
2	Dinas Kesehatan	129.417.799.151	148.210.150.580
3	RSUD CIBABAT	204.421.407.702	245.411.027.176
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.069.568.789	50.027.608.120
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	56.749.620.168	58.938.801.763
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.029.210.058	26.012.726.625
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.980.755.791	6.980.755.791
8	Dinas Sosial	13.771.447.272	14.471.447.272
9	Dinas Tenaga Kerja	9.319.648.353	10.709.440.853
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.280.598.242	17.480.598.242
11	Dinas Pangan dan Pertanian	12.048.477.053	12.397.744.053
12	Dinas Lingkungan Hidup	54.406.395.950	54.406.395.950
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.677.295.758	10.930.518.558
14	Dinas Perhubungan	32.295.570.276	33.705.808.444
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.475.019.360	12.475.019.360
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.748.518.561	30.097.649.874
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	31.928.075.534	43.050.575.084

No	Perangkat Daerah	Pagu indikatif	
		Sebelum	Sesudah
18	Dinas Arsip Daerah	7.372.233.027	7.372.233.027
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	24.100.178.400	24.700.178.400
20	Sekretariat Daerah	61.651.071.652	62.553.592.263
21	Sekretariat DPRD	87.277.207.777	87.277.207.777
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.664.043.562	14.124.783.562
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.639.060.952	13.139.060.952
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.348.954.330	56.860.678.962
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.131.336.350	12.777.461.350
26	Inspektorat	10.154.990.436	10.154.990.436
27	Kecamatan Cimahi Utara	30.301.279.545	30.340.379.545
28	Kecamatan Cimahi Tengah	41.566.298.605	41.584.539.605
29	Kecamatan Cimahi Selatan	37.384.991.144	37.406.063.144
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.356.357.208	10.489.307.208
Total		1.480.824.900.153	1.600.487.285.096

Sumber : Bappelitbangda Tahun 2022 (data diolah)

Rincian lengkap Program dan Kegiatan dari setiap Perangkat Daerah yang ada dalam Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3. 8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
				Pengelolaan Mutasi ASN
				Pengelolaan Promosi ASN
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
				Pengelolaan Data Kepegawaian
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
				Pembinaan Disiplin ASN
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Organisasi Kemasyarakatan	Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
				Penatausahaan Barang Milik Daerah
				Pengamanan Barang Milik Daerah
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Penilaian Barang Milik Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
				Penyusunan Standar Harga
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pemerintah Kabupaten/Kota
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
				Pembinaan Penatausahaan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Penagihan Pajak Daerah
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
				Penetapan Wajib Pajak Daerah
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Konsultasi Publik
7	Dinas Arsip Daerah	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pendidikan Khusus serta Masyarakat
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Kuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
				Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media
				Pelayanan Informasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
				Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
12	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
13	Dinas Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perizinan dan Non Perizinan
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kewenangan Kabupaten/Kota	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
		19	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD			

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
21	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
23	Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Mebel
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Reviu Laporan Keuangan
				Reviu Laporan Kinerja
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
24	Kecamatan Cimahi Selatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
25	Kecamatan Cimahi Tengah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
26	Kecamatan Cimahi Utara	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
27	RSUD CIBABAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Mebel
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
29	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
				Penataan Administrasi Pemerintahan
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
				Fasilitasi Keprotokolan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Mebel
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
30	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD
				Pembahasan APBD Perubahan
				Pembahasan Laporan Semester
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
				Penyusunan Tata Tertib DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penggunaan Anggaran
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				Penyusunan Program Kerja DPRD
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

BAB IV CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

4.1 Evaluasi terhadap sistematika RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

Sistematika hasil penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/kota menurut Permendagri Nomor 86 paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. Rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. Penutup.

Setelah dilihat pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2022, sistematika yang digunakan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

4.2 Capaian Indikator Kinerja RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

4.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja Utama merupakan komponen dari impact atau dampak. Berikut disajikan capaian kinerja sasaran Kota Cimahi tahun 2022.

Tabel 4. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Ketercapaian		Kategori
					%	Keterangan	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,12	78,77	101	Tercapai	Sangat Tinggi
2	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60,73 (B)	62,96 (B)	104 100	Tercapai	Sangat Tinggi
3	Indeks Pendidikan	Indeks	74,9	75,76	101	Tercapai	Sangat Tinggi
4	Indeks Kesehatan	Indeks	83,12	83,85	101	Tercapai	Sangat Tinggi
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persen	1	0,63	137	Tercapai	Sangat Tinggi
6	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	100	Tercapai*)	Sangat Tinggi
7	Nilai LPPD	Predikat	Tinggi	Belum Rilis	-	-	-
8	Opini BPK	Opini	WTP	Belum Rilis	-	-	-
9	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62	57,56	93	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
10	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,2	83,61	93	Tercapai	Sangat Tinggi
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19	3,09	93	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,11	5,92	93	Tercapai	Sangat Tinggi
13	Indeks Gini	Indeks	0,38	0,408	93	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
14	Angka Kemiskinan	Persen	5,02	5,11	98	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,37	10,77	105	Tercapai	Sangat Tinggi
16	Tingkat Pelayanan Jalan	Predikat	C	C	100	Tercapai	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Ketercapaian		Kategori
					%	Keterangan	
	/ Level of Service (LOS)						
17	Rasio luas kawasan kumuh (%)	Persen	0,18	0,036	180	Tercapai	Sangat Tinggi
18	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	100	Tercapai	Tinggi**)
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	36,07	48,002	133	Tercapai	Sangat Tinggi
20	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	82	Belum Rilis		-	-
21	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Indeks	75	Belum Rilis		-	-
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,6	91,97	99	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi

Sumber : Bappelitbanda Tahun 2022 (data diolah)

4.2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan

Rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini adalah capaian bidang urusan untuk tahun pembangunan 2022.

Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU (RP)	REALISASI	KINERJA KEUANGAN (%)	PREDIKAT	KINERJA FISIK (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN WAJIB	1.205.251.325.042	1.029.680.534.605	85,43%	Tinggi	109%	Sangat Tinggi
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	974.017.801.677	833.073.764.369	85,53%	Tinggi	96%	Sangat Tinggi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	416.445.388.499	343.517.280.189	82,49%	Tinggi	99%	Sangat Tinggi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	396.531.823.507	348.178.065.783	87,81%	Tinggi	98%	Sangat Tinggi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76.984.243.316	68.326.535.824	88,75%	Tinggi	109%	Sangat Tinggi
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.436.043.867	33.068.226.117	93,32%	Sangat Tinggi	86%	Tinggi
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.314.164.416	30.580.700.511	91,79%	Sangat Tinggi	97%	Sangat Tinggi
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.306.138.072	9.402.955.945	61,43%	Rendah	88%	Tinggi
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	231.233.523.365	196.606.770.236	85,03%	Tinggi	122%	Sangat Tinggi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.936.044.853	10.282.908.980	94,03%	Sangat Tinggi	80%	Tinggi

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU (RP)	REALISASI	KINERJA KEUANGAN (%)	PREDIKAT	KINERJA FISIK (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.479.352.442	7.724.473.336	81,49%	Tinggi	78%	Tinggi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.391.637.453	9.471.537.727	91,15%	Sangat Tinggi	106%	Sangat Tinggi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	54.608.908.950	48.636.119.860	89,06%	Tinggi	102%	Sangat Tinggi
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.935.590.508	9.662.585.750	88,36%	Tinggi	106%	Sangat Tinggi
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	898.287.800	834.708.649	92,92%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.327.958.000	5.293.103.757	72,23%	Sedang	123%	Sangat Tinggi
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	33.565.820.444	30.808.199.166	91,78%	Sangat Tinggi	92%	Sangat Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.995.863.080	11.165.885.325	85,92%	Tinggi	111%	Sangat Tinggi
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.608.389.000	2.029.869.954	77,82%	Tinggi	144%	Sangat Tinggi
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.685.509.874	22.221.581.505	80,26%	Tinggi	90%	Tinggi

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU (RP)	REALISASI	KINERJA KEUANGAN (%)	PREDIKAT	KINERJA FISIK (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	33.831.678.800	25.464.975.908	75,27%	Sedang	100%	Sangat Tinggi
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	263.938.600	254.577.732	96,45%	Sangat Tinggi	156%	Sangat Tinggi
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.963.346.534	7.637.960.454	95,91%	Sangat Tinggi	143%	Sangat Tinggi
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	605.563.200	554.773.601	91,61%	Sangat Tinggi	51%	Sangat Rendah
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.766.669.827	4.200.371.412	62,07%	Rendah	200%	Sangat Tinggi
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	368.964.000	363.137.120	98,42%	Sangat Tinggi	286%	Sangat Tinggi
III	URUSAN PILIHAN	28.066.504.750	26.478.910.948	94,34%	Sangat Tinggi	117%	Sangat Tinggi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	684.584.700	666.483.744	97,36%	Sangat Tinggi	109%	Sangat Tinggi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.340.549.750	3.228.263.997	96,64%	Sangat Tinggi	110%	Sangat Tinggi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.561.061.900	1.345.144.742	86,17%	Tinggi	176%	Sangat Tinggi
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	17.174.449.400	16.061.979.228	93,52%	Sangat Tinggi	108%	Sangat Tinggi
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.292.054.000	5.163.742.337	97,58%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
6	TRANSMIGRASI	13.805.000	13.296.900	96,32%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU (RP)	REALISASI	KINERJA KEUANGAN (%)	PREDIKAT	KINERJA FISIK (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.584.076.043	65.155.570.920	62,90%	Rendah	117%	Sangat Tinggi
1	PERENCANAAN	13.609.256.962	13.124.745.045	96,44%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
2	KEUANGAN	63.868.292.695	30.757.749.448	48,16%	Sangat Rendah	168%	Sangat Tinggi
3	KEPEGAWAIAN	11.298.705.150	8.842.849.217	78,26%	Tinggi	99%	Sangat Tinggi
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	870.526.600	851.216.544	97,78%	Sangat Tinggi	151%	Sangat Tinggi
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.762.004.200	1.526.994.500	86,66%	Tinggi	88%	Tinggi
6	INSPEKTORAT DAERAH	12.175.290.436	10.052.016.166	82,56%	Tinggi	96%	Sangat Tinggi
V	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	168.612.812.248	151.444.449.647	89,82%	Tinggi	65%	Rendah
1	SEKRETARIAT DAERAH	63.941.399.263	58.482.725.184	91,46%	Sangat Tinggi	102%	Sangat Tinggi
2	SEKRETARIAT DPRD	94.012.207.777	84.064.553.459	89,42%	Tinggi	0%	Sangat Rendah
3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.659.205.208	8.897.171.004	83,47%	Tinggi	91%	Sangat Tinggi
VI	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	109.168.085.394	104.654.781.778	95,87%	Sangat Tinggi	104%	Sangat Tinggi
1	KECAMATAN	109.168.085.394	104.654.781.778	95,87%	Sangat Tinggi	104%	Sangat Tinggi
TOTAL		1.614.682.803.477	1.377.414.247.898	85,31%	Tinggi	103%	Sangat Tinggi

Sumber : Monev RKPD Triwulan IV Kota Cimahi Tahun 2022 (data diolah)

4.2.3 Capaian Indikator Kinerja Program (IKP)

Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Hasil capaian indikator program atau outcome pada tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut menurut Bidang Urusan.

Tabel 4. 3 Realisasi Indikator Program Kota Cimahi Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
Angka Melek Huruf	99,99	Persen	99,99	99,99	100%	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	77,35	Persen	77,35	79,33	103%	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	103,04	Persen	103,04	100,47	98%	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	90,08	Persen	90,08	100,32	111%	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,08	Persen	97,08	95,05	98%	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	76,64	Persen	76,64	82,26	107%	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	97,73	Persen	97,73	99,52	102%	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	79,59	Persen	79,59	89,5	112%	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SD	0,014	Persen	0,014	0,028	200%	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SMP	0	Persen	0	0,02	100%	Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	77,35	Persen	77,35	79,33	103%	Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	96,56	Persen	96,56	93,18	96%	Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	68,06	Persen	68,06	29,09	43%	Dinas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Sesuai dengan SAP	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Nilai AKIP Sekretariat Daerah	B	Kategori	B	B	100%	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Umum dan Protokol	80	Nilai	80	87,38	109%	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada bagian TU (tata usaha)	81	Nilai	81	88,12	109%	Sekretariat Daerah
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	90	Persen	90	87	97%	Sekretariat Daerah
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	46,7	Persen	46,7	42,05	90%	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Bersertifikasi	51,39	Persen	51,39	9,53	19%	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Bersertifikasi	54,66	Persen	54,66	49,1	90%	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	97,6	Persen	97,6	97,8	100%	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Bersertifikasi	78,56	Persen	78,56	59,24	75%	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	97,77	Persen	97,77	99,26	102%	Dinas Pendidikan
Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	100	Persen	100	99,58	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	62,95	Persen	62,95	53,87	86%	Dinas Pendidikan
Persentase LKP yang Terakreditasi	46,67	Persen	46,67	90	193%	Dinas Pendidikan
Persentase penerapan kurikulum sesuai standar	100	persen	100	100	100%	Dinas Pendidikan
Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik	B	Kategori	B	B	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase PKBM yang Terakreditasi	66,67	Persen	66,67	60	90%	Dinas Pendidikan
Persentase Realisasi Anggaran	100	Persen	100	91,7	92%	Sekretariat Daerah
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	Persen	100	95	95%	Sekretariat Daerah
Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B	96,55	Persen	96,55	99,14	103%	Dinas Pendidikan
Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B	86,66	Persen	86,66	91,67	106%	Dinas Pendidikan
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SOP	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	0,046528	Nilai	0,046528	0,049306	106%	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	0,058333	Nilai	0,058333	0,058333	100%	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	0,058333	Nilai	0,058333	0,05625	96%	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,046528	Nilai	0,046528	0,046528	100%	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Dikmas sesuai SNP	100	Nilai	100	100	100%	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang PAUD sesuai SNP	52,1	Nilai	52,1	81	155%	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SD sesuai SNP	95,48	Nilai	95,48	86,71	91%	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP sesuai SNP	77,81	Nilai	77,81	82	105%	Dinas Pendidikan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	Persen	90	96,7	107%	Dinas Kesehatan
Cakupan Rumah Tangga yang Ber PHBS	54	Persen	54	53,4	99%	Dinas Kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Persen	80	79,06	101%	RSUD CIBABAT

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi/Izin	100	Persen	100	100	100%	Dinas Kesehatan
Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	100	Persen	100	100	100%	Dinas Kesehatan
Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian Universal Health Coverage (UHC))	97	Persen	97	98,83	102%	Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	84,62	Persen	84,62	53,85	64%	Dinas Kesehatan
Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standar	100	Persen	100	100	0%	Dinas Kesehatan
Prevalensi stunting pada balita	10,7	Persen	10,7	9,7	91%	Dinas Kesehatan
Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan	83	Persen	83	99,65	120%	Dinas Kesehatan
Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	97	Persen	97	100	103%	Dinas Kesehatan
Tingkat Pengobatan TB yang berhasil	90	Persen	90	87,7	97%	Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Kapasitas Sungai	114,826	m3	114,826	43705	38%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Nilai beban pencemar	31	ton per hari	31	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase air minum layak dan aman	24,23	Persen	24,23	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	72,5	Persen	72,5	72,5	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	8	Persen	8	18,18	227%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase kondisi jalan yang mantap	94,87	Persen	94,87	96,33	102%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase luas genangan di daerah rawan genangan	0,004	Persen	0,004	0,004	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Pemakaman yang tersedia	7,60	persen	7,60	0	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	62	Persen	62	62,2	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80	Persen	80	80	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,82	Persen	69,82	79,36	114%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,48	Persen	77,48	80,8	104%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase luas genangan di daerah tidak rawan genangan	42,86	persen	42,86	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
luas kawasan kumuh ringan	7,23	Ha	7,23	0	3%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	10	Persen	10	0	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100	Persen	100	100	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase rumah tidak layak huni	1,47	Persen	1,47	0	98%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan setapak	1,6	persen	1,6	1,6	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase sarana permukiman yang tersedia taman	0,058	Persen	0,058	0,058	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Tingkat Hunian	100	Persen	100	100	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100	Persen	100	100	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	100	Persen	100	92,31	92%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100	Persen	100	100	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Persen	100	100	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Persen	100	100	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100	Persen	100	92,25	92%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	100	Persen	100	94,6	95%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100	Persen	100	100	0%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	Persen	100	100	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	100	Persen	100	100	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	100	Persen	100	100	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota						Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Warga Negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	Persen	100	100	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	Persen	100	100	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	Persen	100	100	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0,180556	Persen	0,180556	0,180556	0%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Persentase kasus yang diselesaikan	50	Persen	50	100	200%	Dinas Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50	Persen	50	0,8952	2%	Dinas Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	15	Persen	15	8,85	59%	Dinas Tenaga Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	5	Persen	5	0,2598	5%	Dinas Tenaga Kerja
Prosentase kesesuaian program di RTKD dengan program di Renstra	0,9	Persen	0,9	1	111%	Dinas Tenaga Kerja
Prosentase koordinasi kawasan transimigrasi	1	Persen	1	1	100%	Dinas Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	Persen	100	11,8	12%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	90	Persen	90	90	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100	Persen	100	100	0%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	33	Persen	33	33	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	Persen	100	100	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	70	Persen	70	98,4	141%	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaan Energi	2400	kkal/kap/hari	2400	2136	89%	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaan Protein	63	gr/kap/hari	63	66,5	106%	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata Konsumsi Energi	2100	kkal/kap/hari	2100	1982,2	94%	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata Konsumsi Protein	57	gr/kap/hari	57	60,7	106%	Dinas Pangan dan Pertanian
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Air	15,5	Nilai	15,5	10,68	69%	Dinas Lingkungan Hidup
Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Udara	0,6196	Nilai	0,6196	0,62	100%	Dinas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase dokumen rencana lingkungan hidup yang dimanfaatkan	100	Persen	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase luasan kehati kota cimahi yang dikelola	1,18	Persen	1,18	1,15	97%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	50	Persen	50	64	128%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	75	Persen	75	N/A	0%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Penanganan Timbulan Sampah	73	Persen	73	75,22	103%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	55,55	Persen	55,55	77,73	140%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengaduan yang LH tindak lanjuti	100	Persen	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	26	Persen	26	19,55	75%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase perusahaan yang memenuhi baku mutu air limbah	75	Persen	75	85,71	114%	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sampah yang dikelola	99	Persen	99	94,78	96%	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Cakupan penerbitan akte kelahiran	55	Persen	55	54	98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan akte kematian	80	Persen	80	112,73	141%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan kartu keluarga	99	Persen	99	88	89%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	Persen	99	91,4	92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	92	Persen	92	100	109%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Validitas database pelayanan kependudukan	95	Persen	95	100	105%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase Administrasi Kelurahan yang Terbina	100	Persen	100	100	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	100	Persen	100	100	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39	Persen	12,39	18,39	148%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66	Persen	11,66	14,2	122%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46	Persen	14,46	14,41	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,25	Persen	1,25	1,98	158%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,39	Persen	0,39	0,59	151%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,65	Persen	0,65	0,74	114%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio Akseptor KB	79	Persen	79	99,69	126%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio akseptor KB mandiri	80	Persen	80	66,65	83%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,1	Anak	2,1	2,1	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	9	0	9	11,326	126%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Persentase Angkutan yang Layak jalan	95	Persen	95	83,23	88%	Dinas Perhubungan
Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	67	Persen	67	61,25	91%	Dinas Perhubungan
Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	78,09	Persen	78,09	78,09	100%	Dinas Perhubungan
Persentase penurunan titik kemacetan	30	Persen	30	26,67	89%	Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	55	Persen	55	60	109%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Cakupan pengembangan e-Government daerah	80	Persen	80	91	114%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Persentase jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	0,4	Persen	0,4	40	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	0,796528	Persen	0,796528	54,53	292%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase koperasi aktif	0,4	Persen	0,4	0,4	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase koperasi sehat	0,15	Persen	0,15	26	173%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase peningkatan wirausaha baru	24.59.00	Persen	24.59.00	36,6	149%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	17.54	Persen	17.54	14,41	82%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Prosentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan koperasi	0,75	Persen	0,75	0,85	113%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Jumlah kebijakan penanaman modal	2	Kebijakan	2	1	50%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	250	Perusahaan	250	250	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	0,0476	Persen	0,0476	0,0476	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase sistem informasi online penanaman modal	0,625	Persen	0,625	62,5	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	65-70	Persen	65-70	70	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Persentase Anggota Pramuka Yang Dibina	12	Persen	12	12	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	70	Persen	70	70	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	50	Persen	50	50	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sumberdaya olahraga yang terbina	53	Persen	53	53	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
Persentase ketersediaan data statistik daerah. (Persentase data sektoral yang dapat disajikan tepat waktu)	60	Persen	60	93,33	156%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik daerah	35	Persen	35	100	286%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	52	Persen	52	60	115%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase kebudayaan yang dilestarikan	55	Persen	55	94	171%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	3	Persen	3	0	0%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat Kepuasan Pengunjung perpustakaan umum kota	80,27	Persen	80,27	81,13	101%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	25	Persen	25	25	400%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial	10	Persen	10			Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat Kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100	Persen	100	100	0%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Angka Konsumsi ikan	37	Kg/kapita/th n	37	NA	0%	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan hias	1020000	ekor	1020000	2443602	240%	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan konsumsi	252,5	ton	252,5	220,2	87%	Dinas Pangan dan Pertanian
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Persentase Daya Tarik Pariwisata yang dikelola dengan baik	83,33	Persen	83,33	78	94%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase daya tarik wisata yang dipasarkan	83,33	Persen	83,33	100	120%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sumber daya manusia Pariwisata yang memiliki kompetensi	25,18	Persen	25,18	29	115%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	15,87	Persen	15,87	17,14	108%	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100	Persen	100	100	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan dan dibangun	25	Persen	25	80	320%	Dinas Pangan dan Pertanian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	1	Pasar	1	1	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	25	Persen	25	30	120%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	100	Persen	100	100	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase permohonan rekomendasi IUTM, ijin pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan tanda daftar gudang yang dilayani	100	Persen	100	100	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	50	Persen	50	64,94	130%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Tingkat penggunaan produksi dalam negeri	80	Persen	80	80	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Jumlah Sentra Industri Pengolahan	3	Sentra	3	3	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase IKM yang berdaya saing	78,8	Persen	78,8	78,8	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	50	Persen	50	50	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	100	Persen	100	100	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesehaiteraaan Rakvat	84	Nilai	84	80,4	96%	Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	77,00%	Persen	77,00%	80	104%	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	79,05%	Persen	79,05%	79,97	101%	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada Bgian Administrasi Bangunan	77	Persen	77	82,52	107%	Sekretariat Daerah
Persentase ASN pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat PBJ	100,00%	Persen	100,00%	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	97	Persen	97	99	102%	Sekretariat Daerah
Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	71	Persen	71	95,5	135%	Sekretariat Daerah
Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Monitoring kegiatan diperangkat Daerah	1	Persen	1	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase pangadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	100,00%	Persen	100,00%	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Pelaku Usaha terinput dalam SIKP	100,00%	Persen	100,00%	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Standar Biaya Belanja dengan Baik	1	Persen	1	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Pertanggungjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian	100,00%	Persen	100,00%	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	100,00%	Persen	100,00%	100	100%	Sekretariat Daerah
Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100	Persen	100	100	100%	Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	90 (A)	Nilai	90 (A)	80,86 (B)	0%	Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5.01 PERENCANAAN						
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 KEUANGAN						
Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100	Persen	100	100	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100	Persen	100	100	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu	80	Persen	80	100	125%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	2	Persen	2	7,78	389%	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Persentase Realisasi Pajak Daerah	90	Persen	90	115,3	128%	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN						
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80	Persen	80	80,06	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya	14	Persen	14	13,1	94%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang nilai kinerjanya baik	25	Persen	25	23,52	94%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	5	Persen	5	4,98	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	18	Persen	18	15,77	88%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Persentase penelitian yang dihasilkan	100	Persen	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase pertumbuhan inovasi	10	Persen	10	20,27	203%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6.01 INSPEKTORAT DAERAH						
Level Peningkatan Kapabilitas APIP	3	Level	3	2,672	89%	Inspektorat
Nilai Hasil Pengawasan	80	Persen	80	83	104%	Inspektorat
7 UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01 KECAMATAN						
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Persen	80	79,06	101%	RSUD CIBABAT

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	90	Persen	90	100	107%	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	90	Persen	90	100	107%	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	75	Persen	75	100	108%	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	100	Persen	100	100	100%	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100	100%	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100	95%	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100	95%	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	100	Persen	100	100	92%	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	80	Persen	80	100	98%	Kecamatan Cimahi Utara
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	100	Persen	100	90	90%	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100	Persen	100	90,1	90%	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100	Persen	100	93,5	94%	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	100	100	100			Kantor Kesatuan Bangsa

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	2022		CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan						
Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	100	Persen	100	85	85%	Kantor Kesatuan Bangsa

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Bappelitbangda Tahun 2022 (data diolah)

4.2.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Keluaran (output) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Hasil capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut. (Lampiran II)

4.3 Penjabaran RPJMD ke RKPD dan APBD

4.3.1 Analisis Kinerja Keuangan

Pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi membutuhkan pendanaan yang memadai. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 tidak lepas dari perencanaan anggaran. Pendanaan pembangunan Kota Cimahi telah direncanakan selama 5 (lima) tahun pada RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022. Selanjutnya menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran tahunan.

Analisis pendapatan dan belanja bertujuan untuk memberi informasi mengenai kemampuan keuangan Kota Cimahi untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Adapun kinerja

keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Komposisi pendapatan daerah pada APBD Kota Cimahi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berikut dijelaskan dalam tabel tentang realisasi pendapatan Kota Cimahi Tahun 2022 disertai dengan realisasi Tahun 2021.

Tabel 3. 9 Laporan Realisasi Keuangan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022

U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	168.162.607.277	193.890.140.403	115,30	179.891.802.692
Pendapatan Retribusi Daerah	10.549.195.000	11.294.729.342	107,07	11.548.482.640
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597	11.022.613.597	100	9.956.960.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	185.526.164.403	178.469.895.272	96,20	203.707.746.221
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	375.260.580.277	394.677.378.614	105,17	405.104.991.553
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	46.381.576.000	54.229.638.467	116,92	61.309.116.578
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.469.404.000	36.604.255.359	143,72	47.781.705.502
Dana Alokasi Umum	519.937.401.610	519.937.401.610	100	530.425.978.000
Dana Alokasi Khusus	185.227.760.683	161.287.016.436	87,07	131.759.768.941
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	777.016.142.293	772.058.311.872	99,36	771.276.569.021

U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	5.528.168.000	5.528.168.000	100	52.247.274.000
Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	5.528.168.000	5.528.168.000	100	52.247.274.000
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	148.381.756.623	146.414.475.669	98,67	123.865.281.737
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-		-
Bantuan Keuangan Provinsi	12.360.600.000	12.360.600.000	100	105.707.342.961
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	160.742.356.623	158.775.075.669	98,78	229.572.624.698
Jumlah Pendapatan Transfer	943.286.666.916	936.361.555.541	99,27	1.053.096.467.719
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	-	-	-	6.700.327.000
Dana Darurat	-	-	-	
Dana BOS	-	-	-	55.161.824.000
Pendapatan Lainnya	-	-	-	71.950.231
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	61.934.101.231
JUMLAH PENDAPATAN	1.318.547.247.193	1.331.038.934.155	100,95	1.520.135.560.503

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022

(Penjelasan)

b. Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah pada APBD Kota Cimahi Tahun 2022 dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga.

Tabel 3. 10 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2022

U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	759.832.251.968	659.155.357.123	86,75	643.977.236.028
Belanja Barang	677.140.000.849	588.251.320.583	86,87	555.391.457.278
Belanja Bunga	500.000.000	234.672.144	46,93	308.874.114
Belanja Subsidi	-	-	-	410.574.000
Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000	100.000.000	100	
Belanja Hibah	40.262.512.250	39.230.734.867	97,44	18.999.042.200
Belanja Bantuan Sosial	4.202.251.600	3.133.871.600	74,58	2.571.530.000
Jumlah Belanja Operasi	1.482.037.016.667	1.290.105.956.317	87,05	1.221.658.713.620
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	7.039.408.898	171.269.485	2,43	1.924.413.918
Belanja Peralatan dan Mesin	26.716.547.465	22.831.957.980	85,46	40.367.666.054
Belanja Gedung dan Bangunan	51.020.087.498	40.246.977.335	78,88	92.323.402.639
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.398.135.549	16.911.640.321	91,92	109.597.606.795
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.680.699.700	1.408.197.523	83,79	2.847.475.380
Jumlah Belanja Modal	104.854.879.110	81.570.042.644	77,79	247.060.564.786
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	27.890.907.700	6.050.171.068	21,69	12.793.426.443
Jumlah Belanja Tak Terduga	27.890.907.700	6.050.171.068	21,69	12.793.426.443
JUMLAH BELANJA	1.614.782.803.477	1.377.726.170.029	85,32	1.481.512.704.849
TRANSFER				
TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5
Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.614.782.803.477	1.377.726.170.029	85,32	1.481.512.704.849

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022

(penjelasan)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya yang dimaksud disini adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada periode tahun sebelumnya, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto di tahun berkenaan. Adapun faktor yang mendorong terjadinya SiLPA antara lain pelampauan target pendapatan daerah dan penyerapan belanja daerah yang kurang optimal.

Nilai SiLPA pada tahun sebelumnya akan digunakan dalam APBD tahun berjalan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan terbesar dalam rangka menutup defisit daerah. Berikut ini disajikan laporan realisasi dari pembiayaan daerah Kota Cimahi tahun 2022:

Tabel 3. 11 Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tahun 2022

U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	308.665.364.621	308.665.364.620	100	270.898.017.186
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	308.665.364.621	308.665.364.620	100	270.898.017.186
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000	9.777.623.090	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337	855.508.220	35,21	855.508.220
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran	12.429.808.337	10.633.131.310	85,55	855.508.220
PEMBIAYAAN NETO	296.235.556.284	298.032.233.310	100,61	270.042.508.966
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	251.344.997.436		308.665.364.620

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022

(penjelasan)

4.3.2 Pejabaran RPJMD ke RKPD dan APBD Tahun 2022

Koordinasi dan konsistensi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktifitas-aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik

pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya.

Berdasarkan hasil pengolahan data program dan anggaran pada dokumen RPJMD, RKPD dan APBD Kota Cimahi Tahun 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Jumlah program dalam RPJMD, RKPD dan APBD Kota Cimahi Tahun 2022 masing-masing sebagai berikut:

- 1) RPJMD : 120 program
- 2) RKPD : 118 program
- 3) APBD : 118 program

Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

b. Penjabaran program pada RPJMD ke RKPD dan APBD Kota Cimahi Tahun 2021, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seluruh program (100%) di RPJMD Tahun 2021 konsisten dijabarkan ke RKPD dan APBD Tahun 2021.
- 2) Tidak terdapat program baru di RKPD dan APBD Tahun 2021.
- 3) Huruf b diatas mengindikasikan bahwa seluruh program RPJMD yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 telah konsistensi diterapkan dalam perencanaan (RKPD) dan penganggaran (APBD) Tahun 2021.

Secara umum konsistensi penjabaran program RPJMD, RKPD dan APBD Kota Cimahi Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan diatas, disajikan pada Gambar 4.1.

BAB V FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

5.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah, terdapat beberapa faktor yang mendorong dan menghambat dalam pencapaian target kinerja. Secara umum pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan, walaupun beberapa pekerjaan terdapat kendala keterlambatan pembayaran penyedia serta untuk beberapa pekerjaan strategis masih terkendala proses pemilihan penyedia. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi selama periode Triwulan IV pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan pada Perangkat Daerah di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

- Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- Penyerapan anggaran secara umum terkendala dengan keterlambatan pembayaran mundur dari jadwal karena kendala pengelolaan Ganti Uang.

2. Sekretariat DPRD

- Terdapat kendala dalam penatausahaan keuangan berkaitan dengan estimasi kebutuhan Ganti Uang dari tiap bidang, sesuai dengan Uang Persediaan dan kebutuhan anggaran kegiatan.
- Alokasi anggaran Gaji anggota DPRD baru dianggarkan selama 10 bulan dari kebutuhan 12 bulan.
- Terdapat kebutuhan penambahan anggaran untuk reses anggota dewan, sehubungan dengan penambahan konstituen, semula 200

orang/anggota dewan menjadi 500 orang (sebelum pandemi masing-masing anggota dewan sebanyak 1.000 konstituen).

- Terdapat kebutuhan penambahan anggaran untuk kebutuhan bimtek anggota dewan, karena baru terlaksana tiga kali bimtek dari kebutuhan sebanyak empat kali sesuai peraturan perundangan.
- Pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kebersihan yang dilaksanakan dalam anggaran parsial, karena kesalahan input rincian sub-kegiatan sebesar 300 juta akan dilaksanakan pada bulan Juli, dengan estimasi 6 bulan dan kelebihan anggaran akan dialokasikan pada gaji anggota dewan pada anggaran perubahan.
- Penyerapan dan pelaksanaan kegiatan medical check up bagi anggota DPRD terkendala kesulitan mengatur jadwal pemeriksaan sehubungan dengan padatnya agenda masing-masing anggota dewan.
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Renovasi Ruang Sidang Dewan) belum dapat dilaksanakan karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan masukan dari tim Bantuan Teknis DPUPR, yaitu ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

3. Inspektorat

- Penyerapan anggaran mamin, narasumber dan perjalanan dinas dalam daerah belum sesuai dengan anggaran kas karena dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, beberapa pelaksanaan pengawasan tidak dilaksanakan sesuai dengan pedoman.
- Kegiatan Saber Pungli yang mundur dari jadwal yang direncanakan, karena belum ada kesepakatan jadwal dengan Polres dan Kejari.
- Pada sub kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah belum dilaksanakan

rapat koordinasi TPKD karena keterbatasan SDM dan padatnya jadwal pengawasan.

4. RSUD Cibabat

- Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

5. Dinas Kesehatan

- Kegiatan bersumber dana DAK Non Fisik belum maksimal terkait kendala penatausahaan keuangan
- Materi Pemeliharaan Media Promosi Kesehatan masih dalam proses analisa dan aktualisasi informasi.
- Pelaksanaan Re-akreditasi Puskesmas akan dimulai pada bulan Oktober s/d Desember 2022
- Realisasi sesuai acuan insentif non ASN dari Puskesmas
- Jumlah sesuai kuota jemaah haji yang disetujui yaitu 251 jemaah (adanya pengurangan Kuota)
- Sedang persiapan dokumen untuk tender mobil ambulance. Menunggu pemenuhan persyaratan TKDN
- Pengadaan PMT rencananya akan dilaksanakan secara tender, dialihkan menjadi e-purchasing karena tidak memenuhi syarat tender

6. Dinas Pendidikan

- SPM terutama untuk SPP dan DSP SD dan SMP dalam proses pendataan (validasi data) disesuaikan dengan data DTKS
- Dana untuk bantuan mahasiswa sebesar 1 Milyar belum terlaksana mengingat merupakan kewenangan Pusat
- Ada pergeseran koding di kegiatan pengadaan meubelair SMP

- Kegiatan minat dan bakat ada arahan dari provinsi untuk penambahan kegiatan SD dan SMP mengenai Pasanggiri Basa Sunda dan OSN
- Untuk SD: Kegiatan fisik Baros Mandiri 3 dalam proses lelang
- Untuk SMP : Fisik SMP 6 dalam proses lelang
- Untuk Non Formal : Fisik (DAK) dalam proses lelang TK Pembina

7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

- Terdapat beberapa target kegiatan yang tidak bisa terpenuhi sehingga perlu disesuaikan pada perubahan Renja Tahun 2022.
- Masih terdapat kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang belum menjangkau belanjanya sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran anggaran.
- Proses lelang Stadion Sangkuriang masih terkendala perhitungan TKDN.
- Peraturan Wali Kota turunan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RIPDA sebagai dasar hukum untuk pengembangan potensi destinasi wisata Cimahi belum disusun.
- PKS/MOU dan koordinasi yang final antara Pemerintah Daerah dengan Pusdik-Pusdik terkait pengembangan wisata militer masih belum ada.
- Anggaran pemeliharaan dan sarana prasarana pengembangan Ekowisata Cimenteng yang tidak memadai sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- Kendala keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan.

8. Dinas Sosial

- Penyerapan anggaran secara umum terkendala dengan keterlambatan Uang Persediaan sehingga beberapa pembayaran mundur dari jadwal semula.

- Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat dan pemberian bantuan sosial terkendala belum ditetapkan Peraturan Wali Kota terkait.
- Sebagian pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap persiapan dan penyusunan perencanaan.

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,

- Penyerapan anggaran secara umum terkendala dengan keterlambatan Uang Persediaan sehingga beberapa pembayaran mundur dari jadwal semula.
- Monev PATBM seharusnya dilaksanakan di bulan Maret, tetapi karena bersamaan waktunya dengan input data KLA, sehingga acara mundur ke bulan April.
- Pembinaan posyandu semula akan dilaksanakan bulan Maret, diundur setelah juara baru terpilih.
- Belum adanya arahan dari Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan BBGR.
- Terjadi perubahan rencana pelaksanaan rapat pleno mitra kerja dinas (Lembaga kemasyarakatan).
- Pelaksanaan pelayanan KB massal tidak memungkinkan untuk dilaksanakan selama masih kondisi pandemic Covid-19.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika

- Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- Penyerapan anggaran secara umum terkendala dengan keterlambatan Uang Persediaan sehingga beberapa pembayaran mundur dari jadwal semula

11. Dinas Arsip Daerah

- Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan belum ada permasalahan, tetapi kurangnya SDM aparatur dan sarana kerja menjadi kendala penyelenggaraan administrasi perkantoran.

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Penyerapan anggaran terbesar masih dari belanja gaji dan tunjangan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi, terdapat indikator pemberian informasi dan konsultasi melalui sosialisasi, yaitu sosialisasi perizinan dasar, mengingat sejak terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya, semua perijinan berubah dan perlu disosialisasikan kembali.
- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, yang direncanakan dilakukan per triwulan. Telah dilaksanakan di bulan Februari, dengan peserta undangan adalah yang sudah mendaftar di OSS. Peserta dikhususkan ke sektor industri karena ada kewajiban untuk mendaftar ke SIMAS. Salah satu kendala yaitu dari perindustrian sulitnya bertatap muka dengan pelaku usaha.
- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah terkait pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, realisasi triwulan I baru terserap untuk belanja makan dan minum. Rencana awal disusun SOP terlebih dahulu sebanyak 5 SOP, yang merupakan perubahan dari izin-izin lama ke OSS RBA.

14. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

- Terdapat kesalahan kode rekening pada beberapa kegiatan sehingga akan disesuaikan pada perubahan anggaran.
- Belanja subsidi tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 (tidak ada peruntukan subsidi).
- Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain pada belanja perjalanan dinas.
- Terdapat kendala pada proses pengadaan barang dan jasa antara lain untuk :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan terkait penataan kios ikan hias di pasar atas baru
 - Pada UPT Technopark untuk pekerjaan renovasi/pemeliharaan gedung (parkir, pengecatan interior dan partisi lantai 4)
- Pada UPT Technopark, kegiatan dilaksanakan pada di triwulan 3 dan 4 sehingga realisasi fisik dan keuangan menyesuaikan dengan rencana anggaran kas pada triwulan 3 dan 4. Selain itu, Convention Hall BITC lantai 5 dinilai kurang diminati sehingga cenderung kurang produktif.
- Dokumen RPIK Kota Cimahi masih dalam tahap penyelesaian.
- Pada UPT METROLOGI Cimahi, dengan meningkatnya permintaan tera baik dari pelaku industri maupun pedagang, menjadi potensi PAD dari retribusi. Adapun kendala yang dihadapi antara lain :
 - Fasilitas kantor yang belum memadai berdasarkan ketentuan untuk kantor metrology, yang membutuhkan beberapa ruangan terpisah, yaitu ruang kantor dan ruang penyimpanan alat.
 - Performance alat standar menurun dan membutuhkan pemeliharaan rutin.

- Aplikasi tera belum terintegrasi dengan website Kota Cimahi, masih hosting mandiri sehingga dibutuhkan SKHP secara elektronik menggunakan barcode untuk wajib tera agar memudahkan proses.
- Terdapat kendala keterbatasan SDM aparatur yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan.

15. Dinas Tenaga Kerja

- Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain pada belanja tenaga non PNS, fasilitasi narasumber dari Kementerian Tenaga Kerja serta fasilitasi tamu dan perjalanan dinas.
- Anggaran untuk Program Transmigrasi belum dialokasikan, walaupun indicator program merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2017-2021 dan harus diukur dalam pelaporan kinerja.
- Dana DBHCHT belum terserap akibat terkendala penyaluran.

16. Dinas Pangan dan Pertanian

- Terdapat kesalahan kode rekening pada beberapa kegiatan sehingga akan disesuaikan pada perubahan anggaran.
- Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain pada mata anggaran perjalanan dinas serta pajak sewa gudang.
- Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak jadi dilaksanakan pada tingkat Provinsi sehingga direncanakan akan digeser untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
- Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku terhambat karena belum bisa dicairkannya anggaran melalui Belanja Tidak Terduga sebagai alokasi anggaran untuk Kejadian Luar Biasa.

- Terdapat kendala pada pekerjaan pemeliharaan saluran air pada proses pemilihan penyedia karena adanya perhitungan untuk TKDN, dengan ketentuan 40% harus menggunakan produk dalam negeri.

17. Dinas Lingkungan Hidup

- Kendala yang dihadapi terkait waktu penyusunan menyesuaikan dengan deadline dari Kementerian LHK dan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik masih menunggu serta menyesuaikan dengan kondisi pandemi.
- Sistem Informasi Lingkungan yang dikerjakan tahun ini sistem tentang status LH daerah yang nantinya akan digabung dengan Sistem informasi LH bidang lainnya, mulai di triwulan 3 - 4.
- Pengujian sampel air sumur 30 titik terkendala untuk pengujian sampel menunggu lelang sampel di UPT Laboratorium Lingkungan sehingga pengujian menggunakan Laboratorium Kabupaten Bandung Barat.
- Penyedia jasa Tenaga Ahli belum dilaksanakan karena hasil laboratorium pengujian sampel air sumur 30 titik belum keluar
- Terdapat kesalahan kode rekening untuk verifikasi teknis, semula menggunakan kode rekening Tenaga Ahli seharusnya menggunakan kode rekening narasumber.
- Pengadaan barang dan jasa pada UPT Laboratorium Lingkungan masih dalam tahap pelelangan.
- Pelatihan bimbingan teknis baru terealisasi untuk 2 orang (kasubag TU dan 1 org analis baru).
- Sertifikasi analis uji udara belum dapat dilaksanakan karena salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki pengalaman minimal 1 tahun.

- Sub kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup belum dilaksanakan karena belum ada pelaku usaha yang dihentikan sumber pencemarnya.
- Dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Keanekaragaman Hayati, DED RTH telah disusun laporan pendahuluan, sedangkan untuk laporan akhir belum. Feasibility Study akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Untuk Lahan Cimenteng, dapat diverifikasi sebagai Taman Kehati dengan luas minimal 3 hektar, sedangkan status lahan masih banyak lahan bukan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- Untuk sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, terdapat kesalahan indikator kinerja sub kegiatan, terbalik dengan output kegiatan.
- Diperlukan penyesuaian dengan peraturan perundangan terbaru terkait persetujuan lingkungan pengganti izin lingkungan, antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021.
- Dalam program pengelolaan sampah, terdapat penyesuaian target kinerja sub kegiatan karena kemungkinan adanya tumpang tindih tusi pelayanan dan tusi kebijakan, serta diperlukan penyesuaian anggaran terkait JKK dan JKM untuk tenaga harian lepas karena adanya perbedaan angka. Selain itu terdapat perubahan jenis dan volume pengadaan sarana pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan, tetapi belum dilakukan perubahan parsial.

18. Dinas Perhubungan

- Secara umum Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cimahi masih berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan penyerapan terbesar pada gaji dan tunjangan ASN dan THL
- Terdapat kenaikan tarif dasar listrik, perlu dibuat rincian pembayaran untuk setiap pekerjaan sehingga untuk pembayaran listrik PJU/PJL/PJG dapat diketahui realisasinya.
- Adanya belanja kode rekening Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya dan Besaran Anggarannya yang tidak sesuai (pengelola keuangan, yaitu KPA, PPTK, PA, BP, BPP, PPK), sehingga belum terealisasi sampai dengan triwulan I.
- Terdapat Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Himbauan Tidak Melaksanakan program mudik gratis Angkutan Lebaran tahun 2022 sehingga dihimbau kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sektor swasta lainnya untuk tidak menyelenggarakan program mudik gratis angkutan lebaran pada periode lebaran tahun 2022 (1443 Hijriah) guna mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan Covid-19.
- Kendala pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota adalah ketidaksesuaian Juru parkir dan potensi dari tiap SRP yang ada di Kota Cimahi dengan retribusi.
- Pada sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota kendala jumlah pengadaan PJG yang bersumber dari

musrenbang dengan reses dewan, tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran.

- Pada sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, terdapat kendala perusahaan yang menolak untuk dilakukan audit kendaraan angkutannya.

19. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I tidak mengalami hambatan yang berarti.
- Program dan kegiatan pada Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, menyangkut rencana pelaksanaan anggaran terdapat kesalahan dalam hal penetapan anggaran kas dan jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Semula diusulkan untuk pergeseran parsial, tetapi tidak dapat digeser sehingga dijadwalkan sesuai rencana semula, dengan target pelaksanaan dan penyerapan anggaran tidak lebih dari TW 2.
- Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jl. Sriwijaya, berdasarkan hasil konsultasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan, bahwa di atas underpass tidak dianjurkan untuk dibangun JPO. Oleh karena itu, rencana pembangunan JPO Sriwijaya ini akan didrop pada perubahan anggaran.

20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Keputusan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang didalamnya mengatur mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% yang sudah diberlakukan di Kota

Cimahi, memunculkan masalah sulitnya pemenuhan syarat itu termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan berskala kecil.

- Kendala pembebasan lahan pada Penanganan Banjir Melong karena pemilik lahan belum sepakat dengan harga atas appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi.
- Dalam hal Perencanaan Embung Pasirkaliki, siteplan untuk IPA dan kolam retensi membutuhkan revisi karena gambar siteplan yang terdahulu sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Merujuk pada masukan dari Bagian Aset Setda, saat ini DPKP tengah membuat permohonan fasilitasi BPN untuk mengubah sertifikat. Konsekuensinya adalah penyusunan UKL UPL akan menjadi terlambat dilaksanakan.
- Penanganan banjir luapan akibat kurang optimalnya kondisi tanggul sungai perlu ditangani dengan perbaikan /penambahan pondasi agar tidak tergerus aliran air sungai pada saat curah hujan tinggi.
- Beberapa pekerjaan dalam Program Penyediaan PSU, terdapat kekurangan alokasi anggaran, yaitu untuk pemasangan paving, pavement sempadan sungai, jalan setapak,

21. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

- Masih ada kode rekening yang belum tercukupi anggarannya.
- Kendala keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan.
- Belum seluruh SDM aparatur yang ada di Bappenda memiliki kompetensi keahlian terkait pajak khususnya pajak daerah.
- Kendala koordinasi yang terbatas antara pusat dan daerah dalam menentukan maupun merencanakan target pendapatan transfer pusat ke daerah.

- Beberapa perubahan terkait pajak dan retribusi di daerah terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menyebabkan berubahnya target pendapatan daerah

22. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV tidak mengalami hambatan yang berarti dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

- Terdapat kekurangan anggaran untuk fasilitasi rapat dan lembur, mengingat proses input SIPD dan evaluasi kinerja seringkali harus dilakukan di luar jam kerja/hari libur.
- Penyerapan anggaran narasumber lambat karena banyak perubahan jadwal dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal pelaksanaan.
- Masih terdapat kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang belum teranggarkan belanjanya, seperti hadiah Kompetisi Chima serta Forum Satu Data yang sesuai dengan arahan pimpinan.
- Penyusunan perencanaan data, Surat Keputusan dan Peraturan Wali Kota terkait Forum Satu Data masih dalam proses.
- Pekerjaan dengan alokasi tenaga ahli sektor kewilayahan belum dilaksanakan karena belum menemukan penyedia yang sesuai.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian masih dalam tahap pelaksanaan serta terdapat jadwal kegiatan yang digeser karena menunggu data dari BPS.

- Beberapa kegiatan pengukuran indeks kelitbangan tidak dapat dilakukan karena tidak diselenggarakan oleh Kementerian (Pemerintah Pusat), diantaranya Radar Inovasi Daerah (RIDa) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari BRIN. Untuk pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID), masih menunggu jadwal pelaksanaan dari Kemendagri.

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

- Sebagian besar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas.
- Pada Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan dan Pengadaan ASN semula dijadwalkan di bulan Mei 2022 dimundurkan menunggu jadwal dari Kemen PAN-RB dan BKN Pusat.
- Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN semula dijadwalkan di Triwulan I diundurkan menunggu rekomendasi dari Komisi ASN dan KEMENDAGRI.
- Secara umum pergeseran anggaran relatif sedikit hanya karena efisiensi kegiatan yang sudah dilakukan.
- Monev untuk capaian IP ASN sudah dijadwalkan secara rutin

25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan masih rendah karena terkendala perubahan prosedur pengelolaan keuangan dengan adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan belanja dan Ganti Uang Persediaan.

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan masih rendah karena terkendala perubahan prosedur pengelolaan keuangan.
- Sampai dengan Triwulan I anggaran belanja jasa layanan lisensi aplikasi video conference belum digunakan karena masih bisa melaksanakan kegiatan dengan konsep tatap muka. Selisih anggaran merupakan efisiensi anggaran.
- Kegiatan pemeliharaan gedung kantor akan dilaksanakan pada triwulan II, karena ketersediaan anggaran pada kas bendahara tidak mencukupi dan untuk pemeliharaan peralatan kantor dan mebel sesuai dengan kondisi barang.

27. Kec. Cimahi Selatan

- Secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- Masih ada kode rekening yang belum tercukupi anggarannya, antara lain Anggaran BPJS untuk Ketua RT/RW/Lembaga karena adanya kenaikan iuran.
- Kendala keterbatasan SDM aparatur masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Untuk menutupi kekurangan tersebut dibantu dengan THL, tetapi perlu dievaluasi efektivitasnya.

28. Kec. Cimahi Tengah

- Secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

- Masih ada kode rekening yang belum tercukupi anggarannya, antara lain Anggaran BPJS untuk Ketua RT/RW/Lembaga karena adanya kenaikan iuran.
- Kendala keterbatasan SDM aparatur masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Untuk menutupi kekurangan tersebut dibantu dengan THL, tetapi perlu dievaluasi efektivitasnya.

29. Kec. Cimahi Utara

- Secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- Masih ada kode rekening yang belum tercukupi anggarannya, antara lain Anggaran BPJS untuk Ketua RT/RW/Lembaga karena adanya kenaikan iuran.
- Jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan untuk pemeliharaan gedung belum teranggarkan di murni sehingga perlu diakomodir di perubahan.
- Kendala keterbatasan SDM aparatur masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Untuk menutupi kekurangan tersebut dibantu dengan THL, tetapi perlu dievaluasi efektivitasnya.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil dari monitoring dan evaluasi RKPD pada Triwulan IV ini, khususnya pada pencapaian realisasi kinerja dan keuangan telah mencapai lebih dari 50%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan hingga Triwulan IV Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Keselarasan antara program RKPD tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 telah mencapai 100% sehingga tergolong baik, artinya bahwa secara keseluruhan tidak ada program dalam RKPD yang berbeda dengan program dalam RPJMD;
2. Keselarasan antara program RKPD tahun 2022 dengan APBD
3. Tahun 2022 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program dalam RKPD yang berbeda dengan program dalam APBD, meskipun terdapat sub kegiatan yang anggarannya berasal dari Non APBD (Bantuan Provinsi Jawa Barat, DAK, DID);
4. Capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sesuai dengan target, yaitu rata-rata mencapai 52%, walaupun terdapat capaian kinerja yang masih di bawah 50%. Hal ini disebabkan beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis dan non teknis pada pelaksanaan pekerjaan, terutama adanya pemberlakuan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta beberapa kendala kesalahan penempatan kode rekening belanja;
5. Perlu adanya penyesuaian kebijakan berupa Perda atau Perkada terkait Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pada semua sektor terkait tentang penyederhanaan proses perijinan;

6. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian dalam hal indikator, target kinerja, serta jumlah anggaran yang berimplikasi pada perubahan anggaran;
7. Kendala dalam hal keterbatasan sumber daya aparatur secara kuantitas dan kualitas yang terjadi hampir pada seluruh perangkat daerah sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian target kinerja kegiatan; dan
8. Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah diharapkan menjadi acuan tindak lanjut dalam pelaksanaan triwulan selanjutnya.

6.2 Rekomendasi

4.2 Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan TRKPD Berikutnya

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor pada setiap Perangkat Daerah di Kota Cimahi yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan pembangunan Kota Cimahi, maka beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan pada periode triwulan selanjutnya sebagai berikut:

- Perlunya sistem pengendalian internal yang diterapkan pada setiap perangkat daerah, terutama yang terkait dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan.
- Perubahan kode rekening yang belum tepat dapat diakomodir pada perubahan RKPD tahun 2022.
- Adanya penjadwalan ulang kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
- Perlu dilakukan penyesuaian jadwal dan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama pada kegiatan prioritas.

- Perlu pendampingan khusus dari APIP untuk proses lelang dan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pengadaan langsung melalui probity audit agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- Perlu perubahan alokasi anggaran sub kegiatan untuk menyesuaikan dengan keadaan di lapangan ataupun dengan peraturan terbaru.
- Pada beberapa kegiatan/sub kegiatan perlu dilakukan perubahan indikator dan targetnya, selaras dengan Perubahan RKPD tahun 2022.
- Perubahan/penambahan anggaran untuk kegiatan yang belum teranggarkan dapat diusulkan pada Perubahan RKPD tahun 2022.
- Berkaitan dengan kendala kekurangan sumber daya aparatur, dapat dikoordinasikan dengan BKPSDMD serta Bagian Organisasi Setda untuk telaahan analisis beban kerja dan penyesuaian peta jabatan.



**BAPPELITBANGDA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2022**

